

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Kebijakan Amerika Serikat di Asia Pasifik Era Presiden Bill Clinton, yang menjadi judul tugas akhir saya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

1. Setelah berakhirnya Perang Dingin, yang ditandai dengan keruntuhan Uni Soviet maka Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara super power yang ada di dunia. Dengan label yang dimilikinya Amerika Serikat berusaha menyebarkan kekuasaannya keseluruh dunia termasuk ke wilayah Asia Pasifik. Penyebaran kekuasaan yang dimiliki oleh Amerika Serikat tidak hanya meliputi hal-hal yang berkaitan dengan masalah keamanan, namun juga meliputi hal-hal yang berkaitan dengan ideologinya yaitu demokrasi.
2. Setelah kekalahan Uni Soviet yang menandakan kekalahan komunis, ideologi demokrasi seolah-olah ikut menang bersama dengan kemenangan Amerika Serikat. Seperti yang kita ketahui Amerika Serikat merupakan Negara yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, bahkan sering diidentikkan dengan kata demokrasi. Dengan berakhirnya perang dingin dan menangnya Amerika dalam perang dingin maka otomatis Amerika Serikat menjadi negara...

3. Kawasan Asia Pasifik secara geografis merupakan wilayah yang berdekatan dengan Amerika Serikat. Dengan semakin berkembangnya kekuasaan Amerika Serikat maka tentu saja kawasan Asia Pasifik akan terkena pengaruh dari berbagai perkembangan di Amerika Serikat, termasuk dalam hal ideologinya. Secara garis besar, negara-negara di kawasan Asia Pasifik menganut ideologi yang berbeda-beda, baik itu komunis, sosialis, dan lain-lain, bahkan demokrasi yang lahir di kawasan Asia Pasifik khususnya di Asia memiliki karakter tersendiri bahkan berbeda jauh dengan demokrasi di Amerika Serikat. Dengan keanekaragaman ideologi yang ada di Kawasan Asia pasifik maka pembahasan tentang penyebaran demokrasi di kawasan tersebut akan menjadi menarik, ditambah dengan adanya peran Amerika Serikat dalam membantu proses perkembangan demokrasi di Asia pasifik.

B. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui kebijakan-kebijakan Amerika Serikat yang berkaitan dengan demokrasi di kawasan Asia Pasifik.
2. Penulisan ini ditujukan untuk menifestasi dari penerapan teori yang penulis dapatkan dari proses studi.

C. Latar Belakang Masalah

Setelah berakhirnya Perang Dingin yang terjadi di antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang ditandai dengan keruntuhan Uni Soviet, Amerika Serikat menjadi satu-satunya Negara super power yang ada di dunia. Dengan predikat tersebut Amerika Serikat berupaya memperluas kekuasaannya termasuk nilai-nilai demokrasi yang dimilikinya keseluruh dunia termasuk ke kawasan Asia Pasifik.

Kawasan Asia Pasifik merupakan kawasan yang terdiri dari berbagai negara yang berada di beberapa benua yaitu kawasan Asia Timur, Amerika Utara khususnya Amerika Serikat, Australia, New Zealand, atau wilayah selatan Pasifik Barat¹. Kawasan ini merupakan kawasan yang sangat kompleks, karena terdiri dari negara- negara yang memiliki ideologi-ideologi yang berbeda-beda.

Hubungan Amerika Serikat dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik merupakan hubungan yang telah terjalin baik, baik itu yang berkaitan dengan masalah ekonomi, politik, teknologi, keamanan, dan lain-lain.

Fakta yang jelas yang sering kita temukan adalah adanya peranan Amerika Serikat yang sangat vital di wilayah Asia Pasifik². Selain itu Amerika Serikat merupakan patner yang sangat penting bagi Negara-nagara di kawasan Asia Pasifik terutama dalam hal ekonomi³. Namun sebenarnya, Amerika Serikat mempunyai kepentingan tersendiri terhadap kehadirannya di kawasan

¹ Jusuf Wanandi, *Asia Pacific After Cold War*, (Jakarta: CSIS, 1996) hlm. 1.

² *ibid*,

³ *ibid*,

Asia Pasifik⁴. Hal itu salah satunya berkaitan dengan upaya Amerika Serikat untuk menyebarluaskan demokrasi keseluruhan dunia termasuk di kawasan Asia Pasifik. Upaya yang dilancarkan oleh Amerika Serikat dalam memperluas demokrasi di wilayah Asia Pasifik terlihat dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Amerika Serikat untuk wilayah tersebut.

Sejak pemerintahan presiden Reagan, pemerintah Amerika Serikat tidak memiliki kebijakan yang luas terhadap kawasan Asia Pasifik⁵. Namun setelah Amerika Serikat dibawah kepemimpinan presiden Bill Clinton, kebijakan Amerika Serikat terhadap kawasan Asia Pasifik terlihat lebih luas⁶, terutama dalam hal yang berkaitan dengan demokrasi.

Pada pemerintahan presiden Bill Clinton yang memerintah selama dua periode tepatnya pada tahun 1992-1996 dan pada tahun 1996-2000, Clinton sangat menekankan pentingnya penyebaran demokrasi di kawasan Asia pasifik. Bahkan pada awal pemerintahannya, presiden Bill Clinton mengumumkan bahwa demokrasi merupakan salah satu dari tiga pilar dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat selain ekonomi dan keamanan⁷.

Hal tersebut terlihat dari laporan Departement Pertahanan Amerika Serikat tentang strategi keamanan Amerika Serikat untuk wilayah Asia Pasifik pada tahun 1998. Dalam laporan tersebut atau yang dikenal dengan *East Asia Strategy Report(EASR)* dikatakan bahwa kehadiran Amerika di kawasan Asia

⁴ *East Asia and The United States: Current Status and Five- Year Outlook* (Conference Report, September 2000) hlm .69.

⁵ Jusuf wanandi, *The Clinton Administration*,(jakarta:CSIS, 1994) hlm. 3.

⁶ *Ibid*,

⁷ Jin Canrong, *The United States Global Strategy in The Post War and its Implications*

Pasifik bertujuan untuk memfasilitasi perkembangan demokrasi, bahkan salah satu dari tiga tujuan utama dari strategi keamanan nasional pada tahun 1997⁸. Dukungan Amerika Serikat dalam pertumbuhan insitisi dan proses demokrasi di Asia bahkan akan menjadi kunci penting dalam kepentingan keamanan Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik⁹.

Kepedulian terhadap perkembangan demokrasi pada masa presiden Bill Clinton terlihat dalam kebijakan-kebijakan yang dibuatnya untuk negara-negara yang berada dikawasan Asia Pasifik. Salah satunya yaitu kebijakan yang dibuatnya terhadap China. Kebijakan Amerika Serikat terhadap China tidak hanya dipertimbangkan pada insiden Tien An Men, tapi juga berdasarkan pada upaya untuk memperbaiki record China terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia¹⁰. Upaya lainnya yang dilakukan Amerika Serikat terhadap China adalah keinginan Amerika Serikat untuk merubah China kearah yang lebih baik menurut image yang diinginkan Amerika Serikat¹¹.

Kepedulian Amerika Serikat terhadap perkembangan demokrasi di Asia Pasifik juga dapat dilihat dari obsesinya terhadap perkembangan demokrasi di Taiwan¹². Seperti diketahui walaupun China tidak mengakui Taiwan sebagai sebuah Negara, Amerika Serikat secara terang-terangan mengakui kehadiran Taiwan bahkan memberikan perlindungan pada Taiwan.

⁸ *The united States Security Strategy for The east Asia Pacific Region 1998*
(<http://defenselink.mil/pubs/easr98/>)

⁹ *ibid.*

¹⁰ Jusuf Wanandi, *the Clinton Administration and The Asia Pacific* (Jakarta: CSIS,1994)
hlm. 4.

¹¹ Jusuf Wanandi, *Asia Pacific After Cold war.* (Jakarta: CSIS, 1996) hlm. 14.

¹² *ibid.*,hlm. 13.

Selain itu, adanya keterbukaan sistem politik terhadap pluralitas dan perubahan generasi dan kepemimpinan di beberapa negara di Asia Pasifik seperti Korea Utara, Vietnam, Indonesia, dan lain-lain juga menjadi perhatian pemerintah Amerika Serikat pada masa pemerintahan presiden Bill Clinton, karena hal itu dianggap akan menjadi masalah serius pada kawasan Asia Pasifik¹³.

D. Pokok Permasalahan

Dalam mempelajari dan mengobservasi terhadap kebijakan Amerika Serikat di Asia Pasifik dalam rangka menyebarkan demokrasi maka penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan, yaitu:

1. Mengapa pada era presiden Bill Clinton, Amerika Serikat berupaya mengeluarkan kebijakan yang menekankan pentingnya demokrasi di kawasan Asia Pasifik.

E. Kerangka Dasar Teori

Dalam membahas kebijakan Amerika Serikat di Asia Pasifik pada masa pemerintahan Presiden Bill Clinton, maka penulis menggunakan kerangka dasar teori yang relevan untuk membahas masalah tersebut. Adapun kerangka dasar teori yang penulis gunakan yaitu:

¹³ - CSIS, *Bill Clinton's Administration and The Asia Pacific* (Jakarta: CSIS, 1994)

1. Konsep Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri adalah sebuah konsep yang menggambarkan perilaku yang diambil oleh suatu negara ketika mengejar tujuan-tujuan tertentu yang didefinisikan dalam konsep kepentingan nasional. Kebijakan luar negeri manapun merupakan pengurusan kepentingan suatu negara di luar wilayah teritorialnya¹⁴. Karena itu, kebijakan luar negeri dapat mencerminkan hal-hal sebagai berikut¹⁵:

1. Desain kepentingan pada masing-masing negara yang melakukan penyelarasan, bertolak dari pandangan hidup (*way life*) dan pandangan strategis (*strategic view*) stsu dalam rangka merealisasikan berbagai manfaat untuk ummat secara keseluruhan ataupun untuk salah satu kelompok ummat, serta mendesain kepentingan tersebut untuk mencapai target-target yang *achievable* dengan membuat hubungan kausalitas antara apa yang ada dan apa yang hendak direalisasikan.
2. Batasan muatan politik luar negeri. Caranya dengan mempelajari kepentingan dan menyusunnya dalam skala prioritas ke dalam kepentingan vital dan sekunder, serta menjelaskan tatacara mengembannya di luar batas territorial pencaturan internasional melalui pengkajian terhadap pengaruhnya bagi kepentingan negara lain, dan begitu juga bagi negara-negara tersebut.

¹⁴ Muhammad Musa, *Hegemoni Barat terhadap Pencaturan Politik Dunia: Sebuah Potret Hubungan Internasional* (Jakarta: Pushtu Press, 2002), hlm. 24

3. Proses pelaksanaannya. Caranya dengan mengkoordinasikan berbagai sarana pelaksanaan, serta penyelarasan antara kemampuan negara dengan target yang hendak direalisasikan. Negara akan menyusun kepentingannya berdasarkan pertimbangan subjektif, baik ideologis maupun strategis, sebab kepentingan tersebut mencerminkan kebutuhannya, tetapi kenyataannya tidak subjektif murni berdasarkan koneksitas dengan kepentingan negara lain yang ada di dalamnya, khususnya penyusunan kepentingan menjadi vital dan sekunder. Hal itu dilakukan karena kepentingan vital suatu negara akan menyeret negara untuk serta merta berperang dalam rangka meraihnya. Karena itu, dengan sekedar diumumkannya suatu kepentingan, bahwa kepentingan tersebut merupakan kepentingan vital yang nantinya akan memicu ketegangan. Sekalipun umumnya, negara tidak mengumumkan kepentingan vitalnya kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu, dan membiarkannya tetap kabur antara kepentingan vital dan kepentingan sekunder.

Dari sini, sebuah negara akan selalu berusaha agar dirinya mempunyai kemampuan untuk melindungi dan merealisasikan kepentingan negaranya. Kekuatan sebuah negara berpeluang mengalami perubahan, sehingga bisa melemah dan bisa meningkat, misalnya kekuatan militer, kekuatan ekonomi atau bahkan berubahnya posisi internasional, sehingga setiap negara akan mengkaji ulang daftar kepentingan yang telah dibuatnya agar relevan dengan perkembangan baru yang ada

Keberhasilan dalam kebijakan luar negeri menuntut adanya pemahaman yang benar mengenai dunia dan posisi internasional, serta pemahaman yang benar mengenai hubungan internasional¹⁶. Misalnya, negara harus mengetahui negara-negara yang berpihak kepadanya, dan negara-negara yang akan menentanginya, serta negara-negara yang akan berposisi netral. Untuk mengetahui semua itu, maka setiap negara harus menyadari betul akan kepentingannya dan dan tatacara untuk merealisasikan kepentingannya. Setiap negara juga harus menyadari sepenuhnya tentang hubungan dan posisi internasional, sehingga kepentingan yang akan direalisasikan dapat berjalan dengan baik.

Dengan demikian kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat era presiden Bill Clinton merupakan desain kepentingan yang dimiliki oleh Amerika Serikat yang bertujuan untuk mencapai target-target yang telah disusunnya. Untuk itu, Amerika Serikat akan selalu berusaha agar dirinya mampu untuk melindungi dan merealisasikan kepentingan yang dimilikinya, dalam hal ini adalah kepentingan yang berkaitan dengan demokrasi. Untuk mewujudkan kepentingannya, Amerika Serikat berupaya mengeluarkan

2. Teori Elite

Teori Elite merupakan teori yang berada dalam tingkat analisis kelompok, dimana politik luar negeri yang dihasilkan oleh suatu negara didominasi oleh elite politik. Yang dimaksud dengan elite adalah “Sejumlah kecil orang (biasanya kurang dari 0,5 % dari penduduk) yang memiliki paling tidak satu nilai dasar dalam jumlah yang jauh lebih banyak daripada rata-rata penduduk umumnya¹⁷”.

Sejak berabad-abad sudah menjadi dalil pemikiran politik bahwa kekuasaan dalam masyarakat didistribusikan dengan tidak merata¹⁸. Seperti yang dikatakan oleh Gaetano Mosca:

Dalam setiap masyarakat.....terdapat dua kelas penduduk-satu kelas yang menguasai dan satu kelas yang dikuasai- Kelas pertama, yang jumlahnya selalu kecil, menjalankan semua fungsi politik, memonopoli kekuasaan dan menikmati keuntungan yang diberikan oleh kekuasaan itu, sedangkan kelas kedua, yang jumlahnya lebih besar, diatur dan dikendalikan oleh kelas pertama itu¹⁹.

Menurut teori elite, kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh pemerintah mencerminkan kehendak dan nilai-nilai yang dianut oleh elite yang memerintah²⁰. Teori elite mengungkapkan bahwa “*rakyat*” atau “*publik*” sebenarnya adalah apatis dan tidak banyak tahu tentang kebijaksanaan pemerintah. Karena itu, kebijakan publik yang muncul sebenarnya adalah kebijaksanaan yang memenuhi kaum elite politik.

¹⁷ Mohtar Mas' oed, *Studi Hubungan Internasional: Tingkat Analisis dan Teorisasi*, (Yogyakarta: Pusat Antar Universitas- Studi Sosial UGM, 1989), hlm. 56.

¹⁸ Mohtar Mas' oed dan Colin MacAndrews, *Perbandingan Sistem Politik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001) hlm. 77.

¹⁹ *Ibid*,

²⁰ Mohtar Mas' oed, *Studi Hubungan Internasional: Tingkat Analisis dan*

Argumen teorisasi elite politik bisa diringkas sebagai berikut: *pertama*, masyarakat terbagi dalam dua kelompok, yaitu kelompok kecil orang yang mempunyai kekuasaan yang disebut elite, dan kelompok besar orang yang tidak mempunyai kekuasaan yang disebut massa. *Kedua*, sekelompok kecil elite yang memerintah mempunyai karakteristik yang berbeda dengan massa yang diperintahnya. *Ketiga*, perpindahan dari posisi non-elite ke posisi elite politik diatur secara ketat demi memelihara stabilitas dan mencegah revolusi. *Keempat*, kebijaksanaan pemerintah tidak mencerminkan tuntutan massa, tetapi lebih mencerminkan keinginan dan nilai-nilai dasar yang dianut oleh kaum elitnya. *Kelima*, elite yang memerintah sedikit sekali bisa dipengaruhi secara langsung oleh massa.

Implikasi dari teori ini adalah bahwa politik luar negeri yang dikeluarkan oleh suatu negara mencerminkan kepentingan kaum elite yang memerintah. Karena itu, perubahan yang terjadi dalam politik luar negeri sebenarnya adalah akibat dari perubahan pandangan atau kepentingan elite itu sendiri.

Teori elite juga menegaskan adanya konsensus nilai fundamental diantara kelompok elite politik. Dalam hal ini adalah konsensus yang berkaitan dengan "*aturan main*" yang menjadi dasar sistem demi memelihara stabilitas sistem. Teori elite memprediksi bahwa

Jika dikaitkan dengan kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat era presiden Bill Clinton, elite yang dimaksud disini dapat berupa badan eksekutif, badan legislatif maupun partai politik. Seperti yang diketahui bahwa Partai Demokrat yang merupakan salah satu dari dua partai besar di Amerika Serikat berhasil meloloskan Bill Clinton menjadi presiden Amerika Serikat menggantikan George W Bush, dan pada saat yang sama Partai Demokrat juga berhasil mendominasi kursi yang ada di Kongers. Sehingga kebijakan yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat pada era presiden Bill Clinton dapat berupa cerminan dari kehendak atau nilai-nilai yang dianut oleh Partai Demokrat.

Selain itu, kerangka institusional pembuatan kebijakan luar negeri Amerika Serikat bersumber dari konstitusi yang memberikan wewenang kepada presiden dan kongres untuk menjalankan kebijakan luar negeri²¹. Sepanjang Perang Dingin, presiden memainkan peranan yang menentukan dalam pengambilan kebijakan luar negeri. Namun, dengan berakhirnya Perang Dingin, muncul tuntutan dari luar eksekutif untuk ikut serta dalam proses pengambilan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Dalam hal inilah kemudian kelompok elite terlibat dalam pengambilan kebijakan luar negeri Amerika Serikat.

²¹ Bambang Cipto, *Tekanan Amerika Terhadap Indonesia*, (yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003) hlm. 25.

F. Hipotesa

Berdasarkan latar belakang masalah dan kerangka dasar teori penulis menarik hipotesa bahwa kebijakan yang diambil oleh Amerika Serikat pada era presiden Bill Clinton, yang berkaitan dengan demokrasi di Asia Pasifik dipengaruhi oleh elite politik dari Partai Demokrat yang berkuasa sehingga kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan keinginan Partai Demokrat yang selalu menekankan pentingnya nilai-nilai liberal termasuk demokrasi.

G. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam studi ini akan menggunakan teknik pengumpulan data-data sekunder yang bisa diperoleh dengan cara melakukan studi literatur terhadap bahan-bahan yang digunakan yang berasal dari :

- Kepustakaan tentang topik tulisan ini dan buku-buku pendukung yang berkaitan dengan topik tersebut.
- Surat kabar
- Jurnal- jurnal
- Majalah
- Artikel atau tulisan yang terdapat di internet

H. Jangkauan Penulisan

Untuk memperjelas hal-hal pokok dalam melihat permasalahan yang sebenarnya maka penulis menetapkan ruang lingkup dalam penulisan. Untuk membuat terturnya pembahasan atau penulisan, maka penulis akan membatasi pembahasan yaitu hal-hal yang dibahas disini adalah hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah Amerika Serikat pada masa pemerintahan Bill Clinton yaitu pada tahun 1992-2000 yang berkaitan dengan demokrasi di kawasan Asia Pasifik.

I. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi akan dibagi dalam lima bab :

- Bab I Berupa pendahuluan yang berisi alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka dasar teori, hipotesa, teknik pengumpulan data, jangkauan penulisan, sistematika penulisan.
- Bab II Menjelaskan tentang pola-pola kebijakan Amerika Serikat sebelum masa Clinton
- Bab III Menjelaskan tentang kebijakan Amerika Serikat pada era presiden Clinton yang berkaitan dengan Demokrasi di Asia Pasifik.
- Bab IV Akan menjelaskan tentang alasan atau mengapa Amerika Serikat pada era presiden Bill Clinton membuat kebijakan yang berkaitan dengan demokrasi di Asia Pasifik.
- Bab V Kesimpulan

BAB II
POLA – POLA KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT SEBELUM ERA
PRESIDEN BILL CLINTON

Bab ini akan membahas tentang kebijakan-kebijakan luar negeri yang diambil oleh pemerintah Amerika Serikat dari masa ke masa yang diawali dari masa pertama lahirnya Amerika Serikat sampai pada berakhirnya Perang Dingin. Inti argumennya adalah bahwa sejak Amerika Serikat berdiri sampai dengan berakhirnya Perang Dingin, pemerintah Amerika Serikat memiliki gambaran yang berbeda-beda tentang kebijakan luar negerinya, sehingga dengan keberagaman tersebut kebijakan yang diambil oleh pemerintah Amerika Serikat dapat digambarkan melalui pola-pola tertentu. Pola-pola tersebut dapat dijadikan gambaran umum atas sikap atau tindakan Amerika Serikat terhadap dunia internasional, bahkan dapat menggambarkan posisi Amerika Serikat dalam kehidupan internasional.

Bab ini akan dibagi ke dalam sub-sub bab yaitu pertama Kebijakan Amerika Serikat sebelum tahun 1945, kedua Kebijakan Amerika Serikat sesudah tahun 1945 yang meliputi gambaran umum kebijakan Amerika Serikat setelah tahun 1945 dan kebijakan Amerika Serikat di Asia Pasifik.

A. Kebijakan Amerika Serikat sebelum tahun 1945

Amerika Serikat yang memproklamkan kemerdekaannya pada tanggal 4 Juli 1776 memiliki akar sejarah yang panjang. Dari awal lahirnya, jika ditelusuri lebih jauh maka bisa dilihat peran yang diambilnya dalam dunia internasional. Hal itu terlihat dari kebijakan-kebijakan luar negeri yang diambilnya dalam setiap perubahan kepemimpinan. Baik itu dari presiden pertama Amerika Serikat George Washington sampai pada pemerintahan presiden Bill Clinton.

Dalam setiap fase, baik itu pada saat awal berdirinya sampai dengan berakhirnya Perang Dingin, Amerika Serikat memiliki peranan yang bervariasi, bahkan peranan yang dimiliki oleh pemerintah Amerika Serikat dapat dijelaskan dalam pola-pola yang sederhana.

Sepanjang abad ke- 18 dan 19, Amerika Serikat meyakini bahwa politik isolasionis merupakan pilihan terbaik bagi pemerintah Amerika Serikat²². Politik isolasionis pada prinsipnya juga dilandasi oleh pertimbangan moralitas politik. Amerika Serikat memandang bahwa dengan memisahkan diri dari Eropa, maka Amerika dapat tetap menjaga kemurnian nilai-nilai dasar yang diyakini oleh bangsa Amerika.

²² Bambang Cipto, *Tekanan Amerika terhadap Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 71.

Isolasi bukan berarti stagnan atau lemah, tetapi yang dimaksud adalah tidak memihak (netral)²³. Waktu itu, Eropa adalah pentas internasional dan negara-negaranya merupakan negara-negara dunia, sementara konflik antarnegara tersebut untuk merebutkan daerah jajahan terus berlangsung.

Para pemimpin Amerika berpendapat bahwa memihak satu pihak untuk melawan pihak lain adalah sesuatu yang berbahaya²⁴. Amerika Serikat melihat perlunya membiarkan negara-negara Eropa saling melemahkan satu sama lain, sehingga Amerika bisa memperluas kekuasaannya di separuh belahan barat dengan bantuan negara-negara tersebut.

Sepanjang periode antara tahun 1800 hingga 1945, kebijakan luar negeri Amerika Serikat terlihat sangat berhati-hati untuk tidak terlibat secara langsung ke dalam perseteruan internasional yang terjadi pada saat itu, khususnya yang terjadi di kawasan Eropa. Bahkan, Kongres khususnya membatasi kebijakan presiden dalam menjalankan politik luar negeri agar tidak terlibat terlalu jauh ke dalam konflik-konflik di negara Eropa²⁵.

Bahkan, para pemimpin generasi pertama Amerika Serikat memandang bahwa kondisi konfliktual yang terjadi di dunia internasional pada saat itu yang terjadi antarnegara di Eropa merupakan sebuah budaya politik yang tidak sejalan dengan tujuan utama kebijakan luar negeri Amerika Serikat, yakni

²³ Muhammad Musa, *Hegemoni Barat terhadap Pencaturan Politik Dunia*, (Jakarta: Wahyu Press, 3003), hlm. 122.

²⁴ *Ibid*,

²⁵ Bambang Cipto, *Politik dan Pemerintahan Amerika*, (Yogyakarta: Lingkaran, 2003), hlm. 196.

pencapaian nilai-nilai demokrasi tanpa penggunaan kekerasan seperti yang di praktekkan oleh bangsa-bangsa di Eropa pada abad ke-19²⁶.

Presiden pertama Amerika Serikat George Washington menegaskan bahwa ketidakterlibatan Amerika Serikat yang disengaja dalam kerjasama yang mengikat merupakan haluan dasar kebijakan luar negeri Amerika Serikat²⁷. Presiden George Washington juga menguatkan hal tersebut dalam pidatonya :

“Bahwa tidak bijak jika kami melibatkan diri kami dengan ikatan-ikatan semu dalam pergolakan politik dan kelompoknya, serta konflik permusuhan dan persahabatannya. Sesungguhnya posisi kita yang jauh terpisah darinya mengajak kita untuk, bahkan kita dapat mengikuti jalan lain....Mengapa kita harus meninggalkan keistimewaan posisi yang unik ini? Kenapa kita meninggalkan tanah kita untuk berdiri di tanah yang asing dengan kita? Kenapa kita harus mengikat nasib kita dengan nasib Eropa sementara kita melibatkan bangsa kita dengan ambisi-ambisi negara Eropa dan menyainginya dalam kepentingan dan langkah-langkahnya?”²⁸

Hal itu diperkuat lagi dengan lahirnya Doktrin Monroe pada tahun 1823 yang menegaskan bahwa dengan mengambil sikap tertutup dari keterlibatan dengan negara-negara lain (*isolationis*), Amerika Serikat akan terhindar dari bencana peperangan yang selalu menimpa Negara-negara Eropa. Dengan doktrin tersebut, Amerika Serikat menegaskan dirinya untuk tidak menjadi anggota blok manapun atau yang lebih dikenal dengan istilah non-blok.

²⁶ Bambang Cipto, *Tekanan Amerika terhadap Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 72.

²⁷ Ali Muhammad, *Reading Brick Hubungan Internasional Kawasan (Asia Pasifik)*

²⁸ Muhammad Musa, *Hegemoni Barat terhadap Pencaturan Politik Dunia*, (Jakarta: wahyu Press, 2003), hlm. 123.

Politik isolasionis Amerika mulai mengalami perubahan sejak Amerika Serikat dihadapkan pada realitas politik internasional pada peralihan abad ke-19 ke abad ke-20²⁹. Hal itu ditandai dengan adanya keterlibatan Amerika Serikat terhadap konflik-konflik yang terjadi di dunia internasional. Berbagai perkembangan terjadi dalam kurun waktu tersebut, sehingga pada akhirnya pemerintah Amerika Serikat merasa perlu untuk meninjau kembali manfaat dari politik isolasionisme yang dianutnya.

Perang Dunia I merupakan peristiwa penting yang mendorong keterlibatan Amerika Serikat yang lebih jauh ke dalam urusan politik internasional. Berbagai perkembangan- perkembangan mutakhir terjadi di dunia internasional sehingga memunculkan peluang atas keterlibatan Amerika Serikat. Sekalipun demikian, hal tersebut tidak membuat Amerika Serikat meninggalkan Doktrin Monroe yang tetap dipegang teguh oleh para pengambil keputusannya. Keterlibatan Amerika Serikat dalam Perang Dunia I pada dasarnya masih didasari oleh dorongan untuk menegakkan prinsip-prinsip moral universal, yakni untuk membasmi kejahatan. Oleh karena itu, setelah Perang Dunia I selesai, maka Amerika Serikatpun menarik diri dari kancah internasional³⁰.

²⁹ Bambang Cipto, *Tekanan Amerika terhadap Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Palajar, 2003), hlm. 73.

³⁰ *ibid*, hlm. 74.

Dengan demikian maka pola kebijakan luar negeri yang dibangun oleh pemerintah Amerika Serikat sebelum tahun 1945 merupakan pola yang sama dimana pemerintah Amerika Serikat tidak terlalu memperhatikan dunia internasional sehingga hal itupun berpengaruh pada kebijakan luar negeri yang diambilnya, dimana keterlibatan Amerika Serikat dalam dunia internasional hanyalah sebuah usaha dalam penegakan prinsip-prinsip moralnya. Hal itu menunjukkan bahwa pada hakikatnya pemerintah Amerika Serikat tetap menganut politik isolasionis. Prinsip tersebut terus dipertahankan hingga pecahnya Perang Dunia II.

Pada awal Perang Dunia II, Amerika Serikat seperti berdiri dalam dilema antara terjun langsung ke dalam perang atau tetap bertahan dengan politik isolasionisnya³¹. Pemerintah Amerika Serikat dibawah kepemimpinan Presiden Franklin Delano Roosevelt menunjukkan keengganan untuk melibatkan diri. Sekalipun Amerika menyadari bahwa Hitler telah menjadi ancaman serius bagi dunia, namun tidak mudah bagi pemerintah Amerika Serikat untuk mengubah politik isolasionisnya.

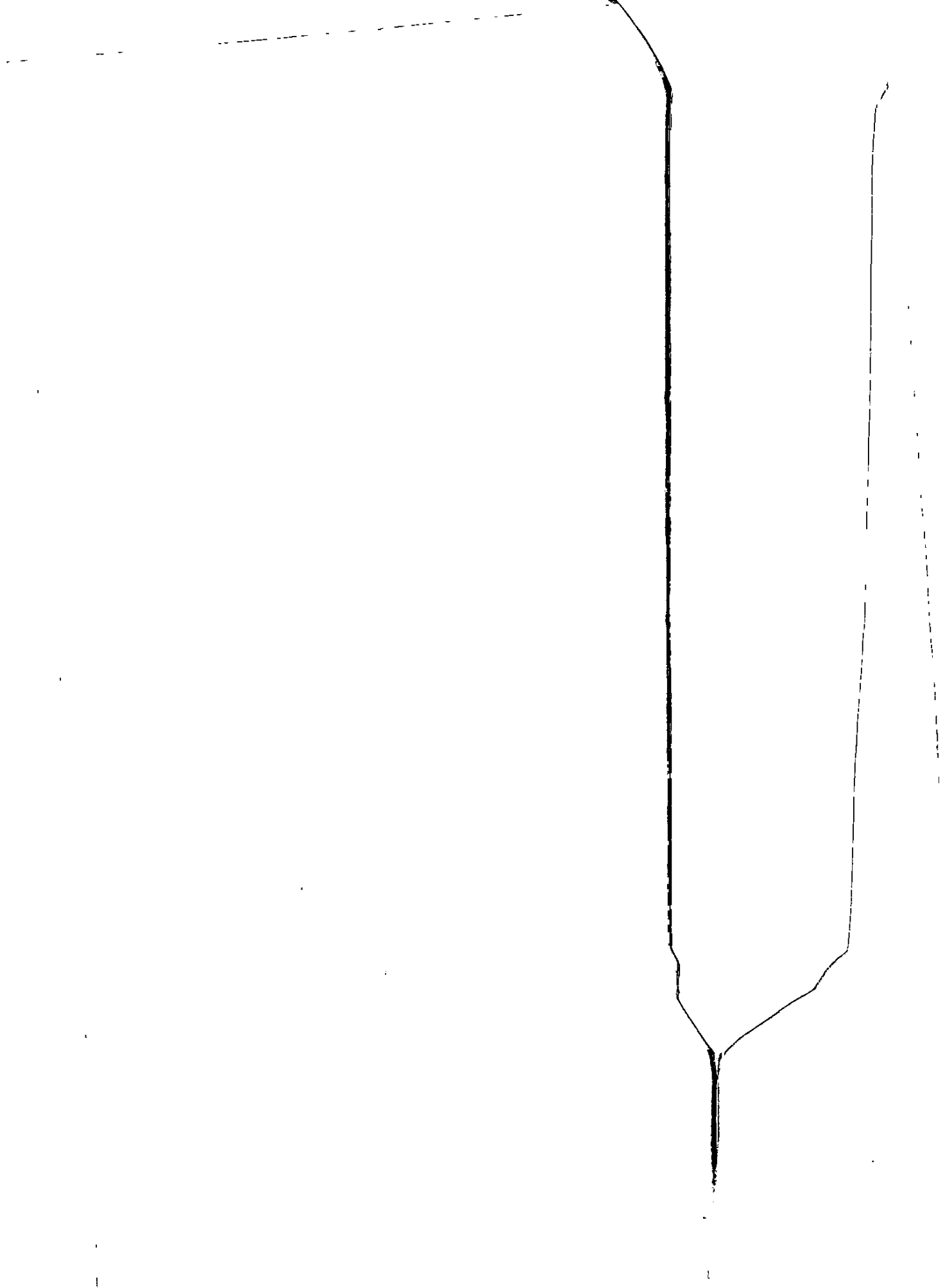
Tradisi isolasionis dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat membuat pemerintah Amerika Serikat kesulitan mengambil keputusan bila dihadapkan dengan dunia internasional, contohnya pada saat Perdana Menteri Inggris Churchill meminta bantuan militer pada pemerintah Amerika Serikat. Pengaruh politik isolasionis terlihat jelas dalam cara pemerintah Amerika Serikat memberikan bantuan tersebut. Pemerintah Amerika Serikat

³¹ Bambang Cipto, *Politik dan Pemerintahan Amerika*, (Yogyakarta: Lingkaran, 2003), hlm. 197.

menghubungkan bantuan yang diberikannya pada pemerintah Inggris dengan kepentingan keamanan Amerika di luar negeri, sehingga Kongres dan publik memandang bantuan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip dasar kebijakan luar negeri isolasionis.

Perkembangan politik internasional pada akhir 1941 secara jelas telah mengubah politik isolasionis Amerika Serikat, bahkan pada tahun tersebut keterlibatan Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik terlihat sangat jelas. Peristiwa pengeboman Pearl Harbor oleh pesawat tempur Jepang seolah-olah telah membangunkan Amerika Serikat dari tidurnya, bahwa keamanan mereka telah terancam. Peristiwa itu kemudian mengubah politik isolasionis pemerintah Amerika Serikat. Dengan cepat Amerika Serikat berubah menjadi sangat agresif dan menggunakan segenap kemampuannya untuk memenangkan setiap peperangan. Bahkan dengan adanya peristiwa tersebut Amerika Serikat seolah-olah berubah menjadi negara yang haus akan kejayaan.

Pada Perang Dunia II, Amerika Serikat yang secara langsung terlibat terlihat sangat agresif. Dengan berbagai kekuatan yang dimilikinya Amerika Serikat berupaya melawan musuh yang dihadapinya, terutama berupaya membalas kekalahan atas Jepang yang telah menghancurkan pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor.



B. Kebijakan Amerika Serikat setelah tahun 1945

B.1. Gambaran umum kebijakan Amerika Serikat setelah tahun 1945

Perang dunia II juga diakhiri dengan berubahnya peta politik dunia, khususnya peta politik Eropa³². Amerika Serikat dan Uni Soviet membelah kawasan dunia ke dalam dua kawasan pengaruh. Amerika, Inggris, dan Perancis di satu pihak dan Uni Soviet di pihak lain, merupakan dua kelompok negara yang memisahkan Jerman ke dalam dua Negara. Pemisahan inilah yang menjadi bibit dari Perang Dingin.

Pada masa Perang Dingin kebijakan luar negeri Amerika Serikat terutama ditujukan pada perluasan pengaruh Uni Soviet yang merupakan ilustrasi nyata dari interaksi diantara nilai-nilai, tujuan-tujuan, dan variabel-variabel taktik lainnya³³. Dengan kepercayaan bahwa Komunisme Soviet sebagai ideologi ancaman terhadap jalan hidup Amerika Serikat, Presiden Truman yang memprakarsai strategi pengepungan (*Containment Strategy*), mencoba untuk merintangai keterlibatan Uni Soviet dan kekuatannya dalam urusan dunia internasional.

Politik pengepungan merupakan tonggak awal kebijakan luar negeri Amerika Serikat paska Parang Dingin. Presiden Truman menghubungkan politik pengepungan tersebut dengan kepentingan nasional Amerika Serikat yang berkaitan dengan kawasan-kawasan di dunia internasional.

Pada masa kepemimpinan Presiden Dwight Eisenhower, ancaman yang timbul merupakan ancaman eskalasi terhadap terjadinya Perang Nuklir. Pemerintah Amerika Serikat menekankan untuk tidak merintangi atau memaksa Uni Soviet melainkan dengan menggunakan cara-cara yang khusus. Pada masa pemerintahan John Kennedy dan Lyndon Johnson dilakukan Strategi "*Competitive Coexistence*", yang merupakan perluasan politik luar negeri Amerika Serikat terhadap kemampuan Uni Soviet yang diubah dari politik luar negeri Presiden Dwight Eisenhower, dan ancaman nuklir secara besar-besaran untuk melawan Uni Soviet dalam bentuk penolakan yang dikenal sebagai "*assured destruction*".

Dibawah kepemimpinan Presiden Richard Nixon, Gerald Ford, dan Jimmy Carter, "*détente*" menjadi semboyan Amerika Serikat, dengan melakukan berbagai penekanan serta diikuti strategi pertahanan, Amerika Serikat lebih memilih untuk membalas tindakan-tindakan Uni Soviet daripada mengintimidasi kepemimpinan Soviet melalui diplomasi pemaksaan³⁴.

Dalam Pemerintahan pertama Ronald Reagan, Amerika Serikat kembali menjadi Agresif. Ia melakukan pendekatan konfrontasi dan penekanan terhadap ekspansi Soviet, bahkan ia menggambarkan bahwa Uni Soviet merupakan "*evil empire*"³⁵. Dalam masa pemerintahan keduanya, Reagan semakin mengakomodasi politik luar negerinya terhadap Uni Soviet. Kebijakan tersebut merupakan dramatis terhadap Amerika Serikat dan dalam

kalanjutan politik luar negerinya. Perubahan dramatis pada Uni Soviet dan politik luar negerinya membuat Amerika Serikat pada masa pemerintahan George W Bush, bergerak melebihi strategi penekanan. Meskipun demikian Presiden George W Bush juga meneruskan kehati-hatian dan pengendalian Amerika Serikat terhadap Uni Soviet, bahkan tidak pernah secara penuh meninggalkan tujuan-tujuan terhadap penekanan pengaruh Uni Soviet dalam hubungan internasional.

B.2. Kebijakan Amerika Serikat di Asia Pasifik setelah tahun 1945

Kebijakan Amerika Serikat dengan segera setelah Perang Dunia II diwarnai oleh keinginan Amerika Serikat untuk membangun dunia yang lebih baik³⁶. Bahkan Presiden Roosevelt mengatakan bahwa dalam konflik tunggal dunia membutuhkan strategi global *self-defences*³⁷. Perang membawa Amerika Serikat kedalam ketegangan agar menyeimbangkan prioritas untuk menjadikan Kawasan Atlantik dan Pasifik kedalam dimensi kepentingan Amerika Serikat secara geopolitis. Salah satu hal yang paling mengejutkan yang terjadi di kawasan Asia Pasifik adalah dengan dijadikannya China sebagai kekuatan utama di kawasan Asia dengan cara melakukan revitalisasi dengan Amerika Serikat melalui kerjasama tertutup³⁸.

³⁶ Bambang Cipto, *Tekanan Amerika terhadap Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 77.

³⁷ Ali Muhammad, *Reading Brick Hubungan Internasional Kawasan (Asia Pasifik)*, hlm. 118.

³⁸ *Ibid.*

Dengan berakhirnya perang di Pasifik, secara langsung telah menyediakan kesempatan bagi Amerika Serikat untuk mempraktekkan idealismenya. Berselang China terlibat dalam Perang Sipil pada tahun 1946, presiden Amerika Serikat mengumumkan dimulainya kebijakan *containment* seperti yang disebutkan dalam Doktrin Truman. Dengan terjadinya perang sipil di China, dengan segera memperlihatkan bahwa China tidak memiliki peranan paska perang internasional.

Jepang paska Perang Dunia II jatuh kedalam pengaruh Amerika Serikat. Amerika Serikat secara penuh mengendalikan kehidupan negara Jepang, baik itu dari segi politik, sosial maupun segi lainnya. Hal itu dilakukan oleh Amerika Serikat karena Amerika masih memiliki ketakutan terhadap agresifitas Jepang, sehingga Amerika Serikat berusaha untuk mengubah Jepang dari sistem kerajaan menuju sistem politik terbuka. Pertengahan tahun 1947, kebijakan Amerika Serikat dalam pendudukan terhadap Jepang di mulai untuk merubah penekanan untuk mencoba menghapuskan sisa peristiwa di masa lalu dengan melakukan kerjasama dalam bidang militer.

Di wilayah Korea, Amerika Serikat mencoba untuk membangun negara demokratik di kawasan Selatan di bawah kepemimpinan Syngman Rhee³⁹. Pada tahun 1947, Uni Soviet menyerahkan berbagai hal kepada Amerika Serikat yang memprakarsai pemilihan umum di wilayah selatan.

Syngman Rhee kemudian terpilih, dan Republik Korea disahkan pada bulan Agustus 1948 dan kemudian melakukan proses konsolidasi. Pada bulan September 1949, Republik Rakyat Korea yang demokratik terbentuk.

Di kawasan Asia Tenggara, kebijakan Amerika Serikat ditujukan untuk memajukan kemerdekaan negara-negara jajahan Eropa. Amerika Serikat bergerak untuk mendukung kemerdekaan Filipina pada tahun 1946. Begitu juga dengan Indonesia, Amerika Serikat menyatakan bahwa Belanda tidak boleh menempatkan kekuatannya di Indonesia. Bahkan pada tahun 1948, Amerika Serikat memberi dukungan terhadap Indonesia dalam menghadapi kekuatan komunis di Madiun.

Secara umum, kebijakan Amerika Serikat setelah tahun 1945 menggambarkan keinginan Amerika Serikat untuk membendung komunis di seluruh dunia. Kebijakan Amerika Serikat di Asia Pasifik sejak tahun 1945 didasarkan pada prioritas global dan kepentingan regional⁴⁰.

Pada Perang Dingin, sebagai doktrin yang universal, *Containment Strategy* di perluas tidak hanya di tujukan untuk kawasan Eropa tetapi juga kawasan Asia Pasifik⁴¹. Dalam berbagai hal, kawasan Asia Pasifik tidak dapat dipisahkan oleh kekuatan nyata yang ada di dunia internasional yang meliputi sistem aliansi militer dengan berbagai perlombaan ideologi, sosial-ekonomi, dan sistem politik. Di Asia, Amerika Serikat berupaya menyeimbangkan beberapa hal yang berlawanan dengan strategi

containment seperti adanya rezim diktator dan pemerintahan yang rapuh dengan tujuan agar demokrasi lebih unggul dibanding komunis.

Strategi penekanan yang direncanakan pada saat itu menjadi prinsip dasar dan sentral dari tujuan-tujuan Amerika Serikat terhadap seluruh negara di dunia termasuk di kawasan Asia Pasifik. Selain itu, penekanan terhadap Uni Soviet tetap menjadi objek utama dari Politik Luar Negeri Amerika Serikat melalui sembilan kali masa pemerintahan berturut-turut dan sampai pada masa berakhirnya Perang Dingin, meskipun terjadi perubahan-perubahan dalam dunia internasional dan lingkungan domestik Amerika Serikat sendiri.

Di kawasan Timur Jauh, Amerika Serikat berhadapan dengan persoalan yang berbeda dengan kawasan Eropa⁴². Cina, Indochina, Jepang dan Korea merupakan negara-negara dengan karakter permasalahan yang berbeda sehingga Amerika Serikat tidak dapat menerapkan politik yang sama seperti di kawasan Eropa. Namun, walaupun demikian Amerika Serikat tetap berusaha keras untuk membendung pengaruh Uni Soviet di kawasan ini.

Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat di kawasan Indochina terbentur oleh Perancis selaku negara penjajah⁴³. Sekalipun Amerika Serikat menentang kolonialisme, Amerika Serikat tidak mungkin menentang Perancis secara gegabah karena Perancis merupakan salah satu sekutu Amerika Serikat sehingga Amerika Serikat enggan untuk mengusir Perancis dari negara-negara Indochina.